

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Implementasi kemitraan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. tahap perencanaan diawali dengan analisis sosial untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan sekitar perusahaan. PTP sebagai BUMN bertanggung jawab atas penyediaan CPO dalam negeri membutuhkan bahan baku, tenaga kerja dan lahan pertanian yang cukup besar, serta penanggulangan konflik dari masyarakat. Sedangkan para petani calon mitra membutuhkan modal usaha, *networking* untuk menjual hasil pertanian, dan pengetahuan bercocok tanam. Dari hasil analisis sosial inilah PTPN VII membuat program yang sifatnya tidak hanya *filantropi* akan tetapi lebih pada pemberdayaan yang bersifat *simbiosis mutualisme*.

Pemda Tk. II Lamteng melalui Disbun Lamteng menyambut baik kehadiran pola kemitraan PTPN VI. Untuk itu disusunlah program kemitraan kelapa sawit berdasarkan surat penawaran kerjasama dari Pemerintah Daerah tingkat II Lampung Tengah. PTPN VII dalam hal ini tidak serta merta melakukan kerjasama, akan tetapi penguatan organisasi lokal juga dilakukan. Pada proses perencanaan, masyarakat atau calon petani mitra dilibatkan secara menyeluruh dimulai dari perencanaan awal hingga pengevaluasian ketika selesainya 94

program. Sosialisasi dilakukan melalui pemuka adat dan Ketua KUD/KUB/KT sebagai perwakilan dari masyarakat. Uniknya pendanaan program kemitraan tidak hanya dari dana PUKK yang sudah ditetapkan oleh Menetri BUMN akan tetapi PTPN VII (persero) juga mengeluarkan dana pribadi di luar dari dana PUKK, ini mengindikasikan keseriusan PTPN dalam pelaksanaan program kemitraan. Selain itu, PTPN juga melibatkan KUD dalam pelaksanaan program guna mempermudah pengajuan kredit ke Bank BNI 46 untuk pelaksanaan program.

Mekanisme pelaksanaan program kemitraan dimulai dari pendaftaran calon petani mitra ke PTPN VII yang diseleksi juga oleh Disbun Lamteng dan Direksi PTPN VII, kemudian setelah diterima sebagai petani mitra maka diberikan pinjaman kredit berupa bibit "saprodi". Guna memberdayakan dan memperkuat organisasi lokal PTPN VII melaksanakan penyuluhan dan pembinaan lapangan. Pembinaan dilakukan melalui 3 macam pembinaan yaitu setiap tiga bulan sekali, setiap bulan, dan setiap hari. Disamping itu PTPN juga menyediakan teknologi pertanian moderen untuk membantu petani mitra. Untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada di lapangan, petani mitra dibimbing langsung oleh mandor. Jika terdapat masalah yang cukup besar maka akan dibahas oleh bidang kemitraan yang selanjutnya akan dimediasikan oleh pihak Pemda Lamteng.

Masalah dan kendala dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Harga komoditas, harga pabrik seringkali lebih rendah dari harga pasaran
2. Banyak potongan yang harus dibayar petani.
3. Petani menjual sawitnya keluar pabrik melalui "Bandar" atau pihak ketiga.
4. Petani kurang paham dengan standar baku mengenai istilah TBS.

5. Penglibatan KUD ternyata berkembang tidak seperti yang diharapkan.

Penanganan permasalahan yang terjadi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dan merevisi kontrak perjanjian antara PTPN VII dan petani mitra sesuai dengan kesepakatan hasil pertemuan yang dilaksanakan.

Keberhasilan dari kemitraan dapat dilihat dengan adanya peningkatan pendapatan, pengetahuan, pendidikan para petani mitra dan penguatan organisasi lokal masyarakat. Sikap *filantropi* yang biasanya sebagai wujud dari *community development* berhasil dikaburkan dengan adanya program yang saling menguntungkan antara PTPN VII dan petani mitra. Akibat adanya pelibatan masyarakat dari awal sampai dengan akhir program, akhirnya masyarakat merasa memiliki program dan berusaha menjaga kelangsungan program ini.

B. Saran

Pada akhir studi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan implementasi program *community development* melalui kemitraan sawit di Unit Usaha Bekri Lampung Tengah.

1. Pada tataran implementasi pihak yang paling interes adalah PTPN VII dan mitra binaannya. Peran Pemda yang kurang signifikan dalam kemitraan dapat dilihat dari motivasi mereka, yang masih bisa dianggap setengah hati. Seharusnya Pemda dapat lebih memiliki peran dalam pembinaan organisasi lokal (KUD) agar dapat lebih berkompeten. Jadi, program ini tidak hanya sebagai wahana untuk menempelkan program yang memiliki citra populis.

2. Dari sisi anggota KUD, secara umum mereka belum mengerti sepenuhnya tentang arti dan fungsi KUD. Apalagi ditambah trauma dengan ketidak beresan manajemen KUD. Untuk mengatasi persoalan ini, ada baiknya jika PTPN VII berkerjasama dengan instansi terkait untuk membenahi manajemen KUD bersama masyarakat.
3. Petani mitra banyak yang beralih menjual TBS-nya ke “Bandar” atau pabrik swasta. Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya PTPN VII menganalisis apakah harga jual yang petani dapatkan dari pihak ketiga jauh lebih baik daripada harga jual ke PTPN VII tanpa dipotong hutang. Karena tidak menutup kemungkinan adanya potongan-potongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jika harga yang dihasilkan lebih baik PTPN VII maka ini dapat menjadi senjata guna menarik kembali petani mitra agar menjual TBS-nya kembali ke PTPN VII.
4. Penentuan harga TBS di PTPN VII merupakan hasil keputusan dari Disbun. Harga komoditi yang acap kali di bawah harga pasaran ini, ternyata menjadi masalah yang cukup krusial. Maka, sebaiknya penentuan harga lebih intensif dilakukan guna mengimbangi harga komoditi yang fluktuatif agar dapat lebih bersaing dengan harga yang ada di pasaran.